

PENERAPAN APLIKASI SAKTI PADA DISKOMINFO SANDI DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE KAB. PINRANG

Implementation Of The Sakti Application At Diskominfosandi In Realizing Good Government Governance Kab. Pinrang

Darmawan¹, Yusni², Sukmawati³, Ananda Hairunnisa⁴, Minahari⁵
Program Studi Akuntansi, Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Parepare

Email: darmawan8387@gmail.com, univ54321@gmail.com, sukmasultamin29186@gmail.com,
Anandahairunnisaa@gmail.com, minaharidolla1@gmail.com

Abstract

Research is intended to analyze and describe Implementation of the sakti application in the Pinrang City Communication, Information and encryption department and Identifying supporting factors as well as obstacle factor. This type of research uses a qualitative descriptive method, with the focus of the research is support and capacity as well as supporting factors and factors barriers to the Implementation of the sakti Application in the Department of the Communication, Information and Coding in Pinrang City data collection techniques used are observation, interviews, documentation. Based on this research, it can be concluded that the implementation of the Sakti Application in the Pinrang City Information Communication and Coding Department is an effort by the Pinrang City government to make it easier ASN/Employees in making PNS KGB, ASN, and Suket (certificate not in criminal process) in the Diskominfo environment. The application of this sakti application can provide benefits, namely: make it easier for Employees to make leave letters, certificates of not being under disciplinary proceedings, setya badges, work satya, karis/karsu and kapreg. However, there are still shortcomings in the process of implementing the Sakti application starting from a lack of understanding of the application, inadequate network, lack of outreach to employees and slow information. Thus, hampering the correspondence process with in the Diskominfo Sandi environment Pinrang City.

Keywords: SPBE, E-Government, Aplikasi Sakti

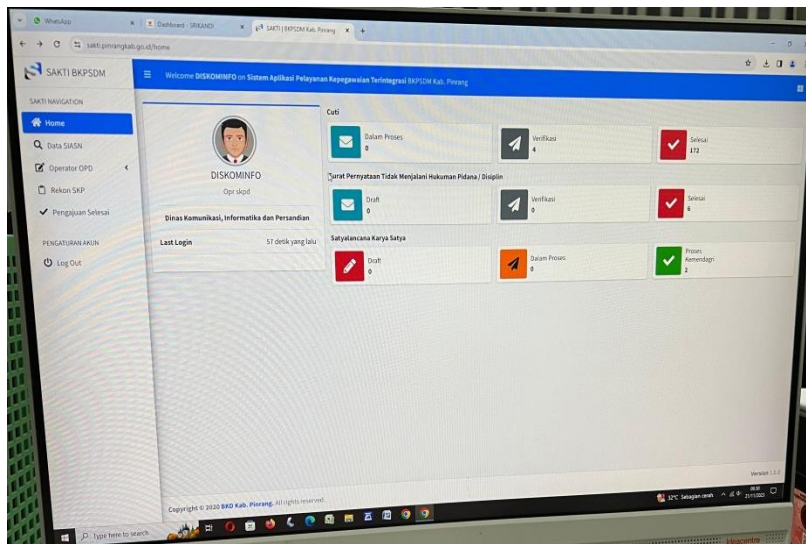
PENDAHULUAN

Telah banyak penerapan digitalisasi pada pemerintahan di Indonesia, baik pada pemerintahan pusat maupun daerah. Dalam hal ini pemerintah harus beralih dari pemerintah tradisional yang identik dengan pemerintahan yang berbasis dengan kertas, hingga beralih menjadi digitalisasi segala bidang pekerjaan dalam sektor pemerintahan yang dikenal dengan Electronic Government.

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Pinrang yang merupakan institusi pemerintah yang mempunyai tugas pokok yang cukup sentral dalam melaksanakan sejumlah agenda pembangunan Kab. Pinrang telah membuat dan mengembangkan sebuah sistem informasi/aplikasi untuk mendukung koordinasi yaitu aplikasi SAKTI yang bisa diakses oleh seluruh pegawai/staff Diskominfosandi.

Sistem informasi/aplikasi ini dibuat tahun 2018. Aplikasi Sakti merupakan kontribusi terhadap visi dan misi organisasi untuk meningkatkan kualitas layanan manajemen data dalam sistem yang terintegrasi. Aplikasi ini digunakan untuk mempermudah dalam hal persuratan, seperti surat masuk, surat keluar, disposisi, pencarian dan pelaporan arsip surat di lingkungan Diskominfosandi Kab. Pinrang. Manfaat dibuatnya aplikasi ini adalah status disposisi atau alur disposisi dapat diketahui dan pengarsipan surat masuk dan surat keluar lebih tertata.

Gambar 1. 1 Halaman Awal Setelah Login Aplikasi SAKTI



Sumber: Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian 2023

Pada gambar 1.1 merupakan halaman awal setelah login di aplikasi. Ada beberapa fitur yang tersedia di aplikasi yaitu Dasbor, Inbox, Cuti, Surat Pernyataan Tidak Menjalani Hukuman Pidana/Disiplin, Setyalancana Karya Satya.

Tantangan utama dalam penerapan yaitu terletak pada Sumber Daya Manusia (SDM) dan bukannya teknologi pendukung dalam hal ini, belum adanya regulasi yang jelas untuk mewajibkan penggunaan aplikasi ini dalam organisasi tersebut padahal sudah sering disosialisasikan kepada pegawai terkait dengan aplikasi ini.

Selain itu, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam bidang aplikasi belum berjalan optimal karena kurangnya kepedulian ASN dalam mengerjakan tugasnya. Aplikasi Sakti yang berjalan saat ini belum sepenuhnya efektif dalam mendukung proses koordinasi karena belum sepenuhnya dimanfaatkan secara maksimal fitur atau *item* terkait menu layanan surat keluar.

Fakta dan permasalahan yang telah dijelaskan diatas menerangkan bahwa penerapan aplikasi ini merupakan upaya pemerintah Kab. Pinrang dalam memanfaatkan TIK untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan administrasi pemerintahan serta pengelolaan surat menyurat yang tepat dan cepat dalam kegiatan administrasi kedinasan. Terkait dengan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk menarik penelitian dengan judul “Penerapan Aplikasi Sakti pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dalam Mewujudkan *Good Government Governance* Kab. Pinrang”

Rumusan Masalah

Dengan demikian sesuai dengan permasalahan dalam penelitian di latar belakang, maka penulis dapat merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Aplikasi Sakti pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dalam Mewujudkan *Good Government Governance* Kab. Pinrang?
2. Apakah yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Penerapan Aplikasi Sakti pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dalam Mewujudkan *Good Government Governance* Kab. Pinrang?

Kerangka Dasar Teori

Manajemen

Definisi manajemen, menurut Manullang (dalam Ratminto & Winarsih, 2016:1) manajemen sebagai “seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan daripada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu,”

Jadi, manajemen adalah suatu proses yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan dengan memanfaatkan sumber daya yang telah tersedia.

Pelayanan Publik

Menurut Ratminto & Atik Winarsih (2016:5) pelayanan public adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jadi, dapat disimpulkan pengertian pelayanan publik adalah pemenuhan kebutuhan dan keinginan masyarakat oleh penyelenggara Negara baik secara langsung ataupun secara tidak langsung berupa barang, jasa ataupun pelayanan administratif.

Manajemen Pelayanan Publik

Menurut Ratminto & Winarsih (2016:4) Manajemen Pelayanan publik adalah suatu proses penerapan ilmu dan seni untuk menyusun rencana, mengimplementasikan rencana itu, mengkoordinasikan dan menyelesaikan aktivitas-aktivitas pelayanan demi tercapainya tujuan-tujuan pelayanan .

Dapat disimpulkan bahwa Manajemen Pelayanan Publik adalah suatu proses implementasi, mengarahkan dan mengkoordinasikan penyelesaian aktifitas pelayanan publik demi tercapainya tujuan pelayanan publik.

Electronic Government (e-Government)

UNDP (*United Nation Development Programme*) dalam (Pratama 2017: 13) *e-government* secara singkat sebagai aplikasi teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah.

Dengan demikian *e-Government* adalah pemanfaatan TIK oleh lembaga pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah untuk memperluas hubungan dan menciptakan dalam interaksi baru antara pemerintah dengan publik terutama dalam hal pelayanan publik.

Pelaksanaan Good Governance

Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* sangat penting dalam pelaksanaan pelayanan untuk meningkatkan kinerja aparatur negara. Hal ini karena pemerintah merancang konsep prinsip-prinsip *Good Governance* untuk meningkatkan potensi perubahan dalam birokrasi agar mewujudkan pelayanan publik yang baik, di samping itu masyarakat masih menganggap pelayanan publik yang di laksanakan oleh birokrasi pasti cenderung lamban, tidak profesional, dan biayanya mahal.

Menurut Sadjijono (2007:203) *Good Governance* mengandung arti: “kegiatan suatu lembaga pemerintah yang di jalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita negara”. Sedangkan menurut AIN & BPKP (2005:5) yang di maksud *Good Governance* adalah “ bagaimana pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dan mengelola sumber-sumber daya dalam pembagian’.

Penerapan *Good Governance* di Indonesia di latar belakang oleh 2 hal yang sangat mendasar:

- a. Tuntutan eksternal
Pengaruh globalisasi telah memaksa kita untuk menerapkan *Good Governance*. Istilah *Good Governance* mulai mengemukakan di Indonesia pada akhir tahun 1990, seiring dengan interaksi antara pemerintah Indonesia dengan negara-negara luar dan lembaga-lembaga donor yang menyoroti kondisi objektif situasi perkembangan ekonomi dan politik dalam negara Indonesia ‘
- b. Tuntutan internal
Masyarakat melihat dan merasakan bahwa salah satu penyebab terjadinya krisis multidimensional pada saat ini adalah terjadinya *juse of power* yang terwujud dalam bentuk KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) dan masyarakat menilai praktik KKN yang paling mencolok kualitas dan kuantitasnya adalah justru yang dilakukan oleh cabang-cabang pemerintah, eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Definisi Konsepsional

Efinisi konsepsional dari “Penerapan Aplikasi Sakti pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dalam Mewujudkan *Good Government Governance* Kab. Pinrang” adalah melihat penerapan pelaksanaan *e-Government* melalui aplikasi sakti yang menyangkut segala infrastruktur *e-Government* baik berupa hukum atau kebijakan sumber daya manusia di dalam organisasi, maupun dana dalam melaksanakan *e-Government*.

METODE PELAKSANAAN

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif (penggambaran) menurut Pasong (2012:75) yaitu penelitian yang mendeskripsikan mencatat, dan mengimplementasikan kondisi-kondisi yang senyatanya dari fenomena yang terjadi pada saat melakukan penelitian.

Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi Fokus Penelitian, diantaranya yaitu:

1. Penerapan *e-Government* melalui Aplikasi Sakti di Diskominfo sandi Kab. Pinrang yang menyangkut segala infrastruktur *e-Government* berupa hukum atau kebijakan, sumber daya manusia di dalam organisasi, maupun dana dalam melaksanakan *e-Government*. Penelitian membahas masalah dengan menggunakan 2 elemen sukses pengembangan *e-Government* yaitu *support* dan *capacity*, penelitian tidak menggunakan elemen value di karenakan penggunaan aplikasi Sakti secara signifikan tidak dirasakan value (manfaat) oleh masyarakat, dikarenakan aplikasi ini dibuat hanya sebagai layanan administrasi kepada para pegawai didalam instansi bersangkutan.
2. Faktor pendukung serta Faktor Penghambat dalam Penerapan Aplikasi Sakti pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dalam Mewujudkan *Good Government Governance* Kab. Pinrang

Sumber dan Jenis Data

Menurut Sugiyono (2013:62) sumber data dalam penelitian terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau ada hubungan dengan menggunakan pedoman wawancara sesuai dengan fokus penelitian.
2. Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan dan diberikan oleh atau suatu instansi, data yang dikumpulkan tersebut sesungguhnya adalah data asli.
Data sekunder terdiri dari:
 - a. Dokumen
 - b. Arsip dan Laporan
 - c. Buku referensi perpustakaan sesuai dengan fokus penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu merupakan suatu langkah yang sangat penting dalam metode ilmiah karena pada umumnya data yang terkumpul di gunakan dalam rangka analisis penelitian. Pengumpulan data menurut Pasalong (2012:130) merupakan proses pengadaan data primer untuk kebutuhan.

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, untuk itu data penelitian yang berupa catatan lapangan dan hasil wawancara akan dianalisa menggunakan alat analisis kualitatif. Teknik Analisis data yang digunakan adalah data model interaktif seperti yang dikemukakan oleh Myles Huberman dan Saldana (2014:33)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini hasil penelitian yang penulis sajikan, hasil penelitian dapat dilihat dari 2 (dua) indikator, yaitu: dukungan (*support*) dan kemampuan (*capacity*). Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan hasil observasi, wawancara langsung ke lapangan dengan informan, dan data serta dokumen yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kab. Pinrang.

a. Dukungan (*support*)

Support merupakan salah satu elemen awal dari inisiatif pembangunan *e-Government* yaitu berupa dukungan. Bentuk dukungan (*Support*) tersebut diantaranya terdiri dari adanya bukti

keseriusan pemerintah dan OPD dalam penerapan *e-Government* dengan mengeluarkan kebijakan berupa peraturan-peraturan sebagai landasan hukum dalam penerapan *e-Government*, selain itu perlu adanya sosialisasi tentang peraturan yang telah di buat sebelumnya.

Berdasarkan wawancara dapat diketahui bahwa dalam hal memberikan dukungan di Diskominfo kepala dinas telah memiliki komitmen serta visi yang jelas untuk terus mengembangkan dan melakukan evaluasi terhadap aplikasi dalam menerapkan kebijakan *e-Government*. Bentuk dukungan lainnya dari Diskominfo yaitu dengan penyediaan server dan selalu melakukan penguatan infrastruktur jaringan yang akan menunjang kelancaran dalam penerapan aplikasi Sakti.

Seluruh pegawai Diskominfo sebagian besar telah menggunakan aplikasi Sakti sesuai dengan prosedur yang ada dan cukup dipahami oleh sebagian pegawai. Diskominfo juga telah melakukan Sosialisasi terkait penerapan aplikasi Sakti.

Hingga sampai saat ini aplikasi Sakti masih terus dikembangkan dan dipantau oleh Kepala Dinas Diskominfo selalu pimpinan pemegang kebijakan dan juga kepala dinas juga aktif dalam menggunakan aplikasi Sakti ini untuk pendisposisian surat. Sosialisasi juga telah dilakukan Diskominfo kepada seluruh pegawai dan staf mengenai bagaimana prosedur penggunaan, maupun pemahaman pegawai mengenai aplikasi Sakti.

b. Kemampuan (*Capacity*)

Yang kedua yaitu elemen *capacity* (kemampuan). Elemen *capacity* terdiri dari ketersediaan sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan infastruktur teknologi.

Kondisi yang ada terkait sumber daya manusia di Diskominfo Kab. Pinrang masih ada beberapa yang belum terlalu paham mengenai aplikasi Sakti ini dikarenakan beberapa faktor, misalnya faktor usia, dan juga ada pegawai yang tidak membidangi bagian teknologi informasi contohnya dari sisi bidang keuangan, atau yang lainnya.

Yang kedua yaitu terkait dengan anggaran sumber daya finansial yang dibutuhkan untuk memenuhi tersedianya sumber daya teknologi infastruktur, sumber daya manusia dan juga digunakan untuk pengembangan *maintenance*, pemberian sosialisasi kepada pegawai, serta yang lainnya. Sumber daya finansial didalam penerapan aplikasi Sakti di Diskominfo diperoleh dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kab. Pinrang.

Teknologi infastruktur merupakan sebagian dari keberhasilan dalam penerapan *e-Government* dan merupakan sebuah *tools* didalam pelaksanaannya. Teknologi infastruktur terdiri dari banyaknya jumlah komputer yang tersedia, jaringan internet maupun jaringan komputer yang menunjang kemudahan bagi pegawai dalam mengoperasikannya.

Kondisi infastruktur teknologi yang mendukung di Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Pinrang sudah cukup tersedia yaitu yang terdiri dari perangkat keras (komputer, printer, dll) dan perangkat lunak (server, jaringan, aplikasi dll). Server yang digunakan Diskominfo dikelola langsung oleh diskominfo bidang TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi).

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Penerapan Aplikasi Sakti pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dalam Mewujudkan *Good Government Governance* Kab. Pinrang

Berdasarkan data yang peneliti lakukan dapat diidentifikasi beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penerapan Aplikasi Sakti di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Pinrang, di antaranya:

Faktor Pendukung

a. Adanya Dasar Hukum serta Komitmen Pemerintah

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi yang peneliti lakukan, faktor pendukung yang pertama yaitu adanya komitmen pemerintah yaitu dengan memiliki visi yang jelas untuk menciptakan suatu sistem pemerintah berbasis elektronik yang disajikan dalam mendukung proses administrasi persuratan di lingkungan Diskominfo Kab. Pinrang sesuai dengan dasar hukum yang mendasar kebijakan penerapan *e-Government* melalui aplikasi Sakti.

b. Ketersediaan Infastruktur Teknologi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadaan infastruktur teknologi di Diskominfo dalam menunjang keberhasilan penerapan *e-Government* melalui aplikasi Sakti sudah memadai dan layak untuk di gunakan.

Faktor Penghambat

- a. Hambatan dari sisi sumber daya yang dimiliki
Sumber daya yang pertama yaitu sumber daya manusia, hambatan dalam penerapan aplikasi Sakti terkait Sumber Daya Manusia yaitu tingkat kesadaran dan kepedulian pegawai yang masih rendah terhadap aplikasi Sakti ini yang terkadang lambat untuk merespon surat yang telah masuk di aplikasi sehingga memperlambat proses persuratan sehingga harus mengingatkan dan memberitahukan lagi secara manual.
- b. Kurangnya Sosialisasi Kepada Pegawai
Menurut pengamatan peneliti, masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan Diskominfo, hal ini dikarenakan bentuk sosialisasi yang dilakukan mengenai aplikasi Sakti hanya sekali saja yang diikuti oleh seluruh pegawai Diskominfo, hal ini yang menjadikan masih kurangnya, pemahaman mengenai penggunaan aplikasi Sakti ini dan tidak ada sosialisasi lagi kepada seluruh pegawai Diskominfo.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penerapan aplikasi Sakti di Diskominfo Kab. Pinrang telah berjalan dari segi kebijakan, sebab kebijakan penerapan Aplikasi Sakti ini telah membantu dalam hal digitalisasi administrasi persuratan dalam sektor pemerintahan. Namun, berdasarkan pada elemen sukses pengembangan *e-Government* yaitu *support* dan *capacity* dapat diketahui masih mengalami berbagai hambatan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka selanjutnya penulis memberikan saran-saran sesuai dengan hasil penelitian dalam Penerapan Aplikasi Sakti pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dalam Mewujudkan *Good Government Governance* Kab. Pinrang sebagai pelengkap penelitian. Diantaranya sebagai berikut:

1. Sebaiknya pihak Diskominfo melakukan sosialisasi sebisa mungkin yang dikemas secara menarik agar dapat membangun kesadaran dan kemauan pegawai untuk bisa menggunakan aplikasi Sakti, selain itu sosialisasi seharusnya dilakukan secara lebih intensif, kontinyu dan konsisten terkait dengan bagaimana penggunaan aplikasi Sakti agar seluruh pegawai dapat menggunakan dan merasakan manfaat dengan adanya aplikasi Sakti.
2. Perlu adanya penyediaan anggaran per tahun sehinggah penerapan *e-Government* dapat menjadi prioritas utama guna memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan *maintenance*, pengembangan aplikasi, sumber daya manusia maupun kebutuhan lainnya dalam penerapan aplikasi Sakti agar penerapan aplikasi sakti dapat digunakan secara maksimal dalam administrasi persuratan sesuai dengan tujuan pembuatan aplikasi tersebut guna mempercepat proses persuratan, pengarsipan, menghemat biaya, dan lebih efektif dan efisien.
3. Perlu adanya sikap responsive dari seluruh pegawai Diskominfo apabila menerima notifikasi surat, sehinggah proses surat menyurat yang ada di Diskominfo dapat di proses dengan cepat sehingga layanan administrasi dapat benar- benar dirasakan manfaatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, R. A. (2020). Pengantar Manajemen Teori dan Aplikasi. *AE Publishing*.
- Aprianty, D. R. (2016). Penerapan Kebijakan E-Government dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, volume 4(4), hlm 1593.
- Melayu, H. (2014). Manajemen: dasar, pengertian, dan masalah. *Penerbit Bumi Aksara*.
- Ratminto, & Atik, S. W. (2016). Manajemen Pelayanan Pengembangan Model Konseptual, Penerapan citizen's charter dan standar pelayanan minimal. *Pustaka Belajar*.
- Sosiawan, E. A. (2008). Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi E-Government di Indonesia. *Seminar Nasional Informatika, 2008 (SemnasIF)*, 99-108.
- Pedoman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare
- Sumber Internet:
- <https://kominfo.pinrangkab.go.id>
- <https://sakti.pinrangkab.go.id>

LAMPIRAN



Gambar 4. 1 Ruang Pelayanan



Gambar 4. 2 Media Center



Gambar 4. 3 Penerimaan Peserta Magang



Gambar 4. 4 Penarikan Peserta Magang